

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Baum, David. 1999. "Business Links". Oracle Magazine Vol. XIII.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jogjakarta: Andi Jogjakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013 . Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017 . Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sanusi, M. Arsyad. (Juni 2001). E-Commerce: Hukum dan Solusinya, PT. Mizan Grafika Sarana.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
- Vanhoose, David. (2003). E-Commerce Economics. USA: Thomson Learning.
- Waluyo dan Wirawan. (2011). Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Widi Widodo. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Alfabeta, Bandung.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :**

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003. tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha

dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/Pj/2013. Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

UU Nomor 7 Tahun 2014. tentang Perdagangan.

UU Nomor 11 Tahun 2008. tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

UU Nomor 28 Tahun 2007. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU Nomor 36 Tahun 2008. tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Jurnal :**

Acbjari, Didi. (2000). Potensi Manfaat Dan Problem Di E-Commerce. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 1000, VoL 15, No.3, 388 -395.

Bhakti Primanto Astera, 2005, jurnal masalah pajak penghasilan atas electronic commerce.

Dian Wirdasari, 2009, jurnal teknologi ecommerce dalam proses bisnis.

Intervening. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan. Juli. 2(2):40-53.

Sitorus, Riris Rotua dan Yeny Kopong. 2017. Pengaruh E-Commerce Terhadap

Jumlah Pajak yang di Setor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

Waryanto. B. and Milafati. Yes. (2006). Method of Successive Interval in Community Research (Ordinal Transformation Data to Interval Data in Mathematic Education Studies). International Journal of Social Science and Humanities Research ISSN 2348-3164 (online). Vol. 4, Issue 2, pp: 356-363, Month: April - June 2016.

### **Skripsi :**

Winardi, Wahyu. 2002. Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi E-Commerce Berdasarkan UU No. 18 tahun 2000. Tesis tidak dipublikasikan. Jakarta: Program Studi Magister UI.

Shady Alva, Rafael (2007) Analisa Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Transaksi E-commerce di Indonesia. Unpublished thesis. Universitas Kristen Petra. Surabaya, Indonesia.

Mulijadi, Nadia. 2017. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-Commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak atas Transaksi E-Commerce. Tesis tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAR.

### **Situs Web :**

Darrusalam. (2010). "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawasan Perpajakan" <http://www.ortax.org> Diakses pada 13 Juli 2018.

"Teori Kepatuhan" [repository.usu.ac.id/bitstream](http://repository.usu.ac.id/bitstream) Diakses pada 13 Juli 2018

"Teori Pengetahuan" <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102> Diakses pada 13 Juli 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a0993960c952/kemenkeu--pengenaan-pajak-ecommerce-terkait-tata-cara> Diakses pada 11 Juni 2018

<https://id.scribd.com/document/182255936/Pemungutan-Pajak-atas-Transaksi-E-Commerce-pdf> Diakses Pada 11 Juni 2018

[https://kominfo.go.id/content/detail/10524/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-meningkatcukup-pesat/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/10524/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-meningkatcukup-pesat/0/sorotan_media) Diakses pada 11 Juni 2018

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=9804&q=&hlm=3>  
Diakses pada tanggal 13 Mei 2018

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) Diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

[www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com) Diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Diakses pada tanggal 03 Agustus 2018

